

ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Oleh

TASYA AZMI NABILA

Kebijakan peraturan pelecehan seksual di Indonesia masih belum jelas sedangkan Korea Selatan memiliki peraturan mengenai kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi pelaku, dan undang-undang pelecehan seksual digital. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Perbandingan KUHP di Indonesia dengan *Criminal Code* di Korea Selatan?, Bagaimanakah Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia dengan Korea Selatan?

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Tim Advokat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, serta dosen dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang dianalisis meliputi data primer dan sekunder, dengan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidananya berbasis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejak Tahun 2023, Indonesia tengah mempersiapkan versi terbaru KUHP yang dikenal sebagai KUHP Nasional, yang direncanakan akan berlaku pada Tahun 2026. Sementara itu, Korea Selatan juga mengadopsi sistem *civil law* dan memiliki KUHP sendiri, yaitu *Criminal Code*, yang telah diterapkan sejak Tahun 1953 dan telah mengalami dua puluh kali amandemen. (2) Terdapat perbedaan signifikan dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Korea Selatan. Negara ini memiliki sejumlah regulasi, termasuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi pelaku, serta pengumuman identitas pelaku pelecehan seksual, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban. Di samping itu, Korea Selatan juga memiliki peraturan khusus terkait

Tasya Azmi Nabila

pelecehan seksual digital. Sayangnya, di Indonesia, belum ada peraturan yang mengatur dan mengatasi isu tersebut secara efektif.

Saran di dalam penelitian ini adalah: (1) Kebijakan perundang-undangan terkait pelecehan seksual harus dilakukan secara spesifik. (2) Perlunya melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait pendidikan seks dan juga bagaimana pencegahan terhadap pelecehan seksual.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perlindungan Korban, Indonesia, Korea Selatan.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT IN INDONESIA WITH SOUTH KOREA

By

TASYA AZMI NABILA

Sexual harassment regulatory policies in Indonesia are still unclear while South Korea has regulations regarding chemical castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation of perpetrators, and digital sexual harassment laws. The problems in this study are: How is the Comparison of the Criminal Code in Indonesia with the Criminal Code in South Korea?, How is the Comparison of the Protection of Victims of Sexual Harassment in Indonesia with South Korea?

In this research, the approach used is normative juridical, which is supported by an empirical juridical approach through in-depth interviews with resource persons from the Advocate Team of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Lampung Province, as well as lecturers from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analyzed includes primary and secondary data, with a qualitative analysis method.

The results of this study show: (1) In the Indonesian context, the criminal law system is based on the Criminal Code (KUHP). Since 2023, Indonesia has been preparing the latest version of the Criminal Code known as the National Criminal Code, which is planned to take effect in 2026. Meanwhile, South Korea also adopts a civil law system and has its own Criminal Code, which has been implemented since 1953 and has undergone twenty amendments. (2) There are significant differences in the protection of victims of sexual harassment in South Korea. The country has a number of regulations, including chemical castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation of perpetrators, as well as the announcement of the identity of perpetrators of sexual abuse, which aim to provide more protection to victims. In addition, South Korea also has special regulations related to sexual harassment.

Tasya Azmi Nabila

digital sexual harassment. Unfortunately, in Indonesia, there is no regulation that effectively regulates and addresses the issue.

The suggestions in this study are: (1) Legislative policies related to sexual harassment must be carried out specifically. (2) It is necessary to educate the public regarding sex education and also how to prevent sexual harassment.

Keywords: Legal Comparison, Victim Protection, Indonesia, South Korea.